

**KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**PIPI OKTAFIA
0810111033**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

No. Reg. 3570/PK VI/04/2012

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amiroeddin Sjarif, Perundang - Undangan, Dasar, Jenis dan Teknis Membuatnya, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Alfan Miko, Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Abdul Rozaki, d.k.k, Prakasa Desentralisasi Dan Otonomi Desa, Ire Press, Yogyakarta, 2005.
- A.Hamid S. Atamimi, Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Dasar-dasar Pembentukannya, Kansius, Yogyakarta, 1998.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind.Hill, Jakarta, 1999.
- Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Blasius Urikame Udak, Penguatan Parlemen Desa (Panduan Untuk Fasilitator Otonomi Desa), Yayasan Peduli Bersama, Kupang, 2003.
- Bambang Sunggono, metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bayu Suriangrat, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Bandung, 1976.
- Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Didi Najmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- , Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT. Raja Grafindo, 1993.

Kamus Besar Bahasas Indonesia, Departemen D dan K, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1990.

Leo Kalesara, Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Village Governance), Sam Ratulangi University Press, Manado, 2003.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Ni`matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

-----, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UUI Press, Yogyakarta, 2010.

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Rikardo Simamarta, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta, 2006.

Syahmunir, Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Minang Kabau Sumatra Barat, Padang, 2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit : Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, P.T. Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Perda Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pembentuk dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari.

C. Jurnal

Ilhamdi Taufik, Kebutuhan Peraturan di Daerah (Suatu Pendekatan
Preskriptif), Anggrek Law Firm Bekerja Sama Dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman, Vol.1, Padang, 2001.

E.P. Rumayar, Peraturan Daerah Pemerintahan Wana untuk Good
Governance di Minahasa, Sam Ratulangi University Press, Vol.1,
Manado, 2003.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peraturan Perundang-undangan.....	12
1. Jenis Peraturan Perundang-undangan.....	15
2. Landasan dan Asas-asas Peraturan Perundang-undangan.....	16
B. Peraturan Nagari.....	22
1. Sejarah Pembentukan Peraturan Nagari.....	23
2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Nagari.....	27
3. Jenis Peraturan Perundang-undangan di tingkat Nagari.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Kedudukan Peraturan Nagari menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan...	30
B. Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap kedudukan Peraturan Nagari yang berlaku saat ini.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	54

DAFTAR KEPUSTAKAAN